



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HAMKA HENDRA NOER**
2. Jabatan : **PJ. GUBERNUR**
3. NHK : **217524**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 11.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Bangunan Seluas 42 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
4. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
5. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 3.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 555.500.000**

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, MAZDA X2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC HATCHBACK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
5. MOBIL, MERCY SMART FORTWO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	182.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.500.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	63.708.220
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	13.551.208.220
III. HUTANG	Rp.	1.540.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.011.208.220

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.